EFEKTIVITAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

Oleh : Ade Sartika
Email: adesartika308@gmai.com
Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas. Km 12,5 Simp. Baru,Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is a virus that spreads rapidly, including in Pekanbaru City. The initial case of Covid-19 in Pekanbaru City was in March 2020 and there was a very fast case development so that special handling was needed to suppress the spread of Covid-19 carried out by the Pekanbaru City Health Sector. In the implementation of the handling of Covid-19 in Pekanbaru City, the Health Sector followed the scheme of the Decree of the Minister of Health HK.01.07/Menkes/250/2020 concerning the Establishment of Large-Scale Social Restrictions in the Pekanbaru City Area in the Context of Accelerating Handling of the 2019 Corona Virus Disease.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Pekanbaru City Government in handling Covid-19 in the Health Sector in 2020 and the inhibiting factors for the effectiveness of the Pekanbaru City Government in handling Covid-19 in the Health Sector. This research uses qualitative method with descriptive research type. This method aims to get the right picture and explain the effectiveness of the Pekanbaru City Government in handling Covid-19 in the Health Sector.

The results of this study are the Pekanbaru City Government in handling Covid-19 in the Health Sector with various policies and activities or handling efforts that are considered ineffective. Although various efforts have been made, such as Find, Treat and Heal (TOS), implementation of Pre-Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Phase I to Phase III Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Curative activities, preventive activities and promotive activities carried out by the Health Sector have not been effective as seen by the high number of Covid-19 cases in Pekanbaru City and the lack of facilities and infrastructure available in the Pekanbaru City Health Sector to handle the increasing number of Covid-19 patients.

Keywords: Effectiveness, handling Covid-19

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Infeksi Virus *Corona* yang disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019)* pertama kali ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi begitu cepat. Sejak di umumkan pertama kali temuan kasus positif oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kasus menyebar dengan sangat cepat di 34 provinsi hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Kemudian melonjak tajam pada 22 April 2020 menjadi 3.351 kasus positif dan 301 meninggal karena Covid-19.[1]

Peningkatan jumlah kasus yang begitu cepat dan membutuhkan penanganan segera dengan adanya indikasi tersebut kemudian Pemerintah di beberapa daerah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan *lockdown* atau isolasi total atau karantina. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sejak ditemukan wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru pada awal Maret 2020, telah terjadi perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai wilayah zona merah penyebaran Covid-19 pada tanggal 13 April 2020. Berdasarkan data kasus Covid-19 Kota Pekanbaru sampai tanggal 13 April 2020, Kasus positif Covid-19 bertambah menjadi 20 orang, terdapat dua pasien yang dinyatakan sehat, sedangkan sudah ada dua warga yang meninggal dunia sebelum sempat mendapat perawatan kesehatan dan terkonfirmasi positif Covid-19.

Maka untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan Pra Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 sampai dengan PSBB tahap III. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) tahap 1 di Kota Pekanbaru dilakukan pada tanggal 17 April 2020 dan mengikuti skema Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selama pelaksanaan awal PSBB di Kota Pekanbaru telah terjadi perkembangan penyebaran kasus yang cukup tinggi dan cepat menunjukkan bahwa terjadi perkembangan kasus setiap bulannya yang dapat dilihat dari perkembangan kasus sejak Pra PSBB sampai dengan PSSB III di Kota Pekanbaru pada tabel dibawah ini:

[1] Pusat Penelitian Politik. Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah "Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19". http://politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2020/1377-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19 . Diakses pada 06 Juli 2020. Pukul 10.00 wib

Tabel 1.1 : Perkembangan Kasus Covid-19 Kota Pekanbaru dari Pra-PSBB Sampai PSBB III

No	Uraian	Pra PSBB	PSBB Tahap 1	PSBB Tahap II	PSBB Tahap III	Total
		3 Maret-16 April 2020	17-30 April 2020	1-14 Mei 2020	15-28 Mei 2020	
1	Orang Dalam Pemantauan	3.752	405	494	548	5.199
2	Pasien Dalam Pengawasan	123	176	145	96	540
3	Pasien Positif	17	4	18	1	40
Jumlah		3.892	585	657	645	5.779

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) II Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kasus Covid-19 Kota Pekanbaru sejak Pra-PSBB hingga PSBB III. Dengan jumlah total kasus selama pelaksanaan Pra-PSBB yaitu sebanyak 3.892 kasus, selanjutnya terjadi penurunan kasus pada pelaksanaan PSBB II yang dapat dilihat dari total kasus pada pelaksanaan PSBB II sebanyak 657 kasus turun menjadi 645 kasus pada pelaksanaan PSBB III. Kemudian terjadi penurunan kasus positif Covid-19 yang sebelumnya pada PSBB II berjumlah 18 kasus positif kemudian menurun menjadi 1 kasus positif selama pelaksanaan PSBB III berlangsung menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus positif yang sangat drastis dari PSBB tahap II. Selanjutnya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru Dinas Kesehatan Kota melakukan upaya dengan semboyan Temukan, Obati dan Sembuhkan (TOS) terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) agar tidak terjadi penambahan kasus positif Covid-19.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengikuti skema dari Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Pekanbaru dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase* 2019. Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan kapasitas ruangan perawatan sudah memadai untuk menangani pasien Covid-19. Kemudian di terbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu, yang di dalamnya menetapkan Rumah Sakit beserta alamat Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, serta mengatur tugas Rumah Sakit, pembiayaan, serta pelaporan. Dalam hal ini Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru telah menyediakan Rumah Sakit Rujukan

serta dokter yakni Rumah Sakit Daerah Madani sebagai Rumah Sakit konsentrasi khusus melayani pasien Covid-19.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) I Kota Pekanbaru dimulai pada tanggal 17 s.d 30 April 2020, kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19. Dilihat dari situasi penyebaran Covid-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekanbaru dengan jumlah kasus positif yang meningkat kemudian Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan promotif berupa:

a. Media elektronik: Radio, Tv (Humas Pemko)
b. Penyuluhan Mobile yang melibatkan 21 Puskesmas di sekitaran Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
c. Media cetak berupa baleho, spanduk, poster, flayer, leaflet
d. Pemberdayaan masyarakat dengan menyiapkan Kelurahan siaga Covid-19.
e. Tempat umum berupa Mall, swalayan, pasar tradisional.

Selain kegiatan promotif Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga melakukan kegiatan preventif berupa penyemprotan disinfektan dan penyelidikan epidemiologi. Juga melaksanakan kegiatan kuratif berupa:

1. Penyiapan Rumah Sakit Madani Sebagai Rumah Sakitt Rujukan dan kerjasama pengembangan 22 Rumah Sakit Rujukan
2. Pengadaan dan penyediaan obat-obatan dan logistik
3. Pengadaan dan penyediaan Alat Pelindung Diri
4. Penyediaan dan akomodasi untuk tenaga medis
5. Pemberian insentif bagi tenaga medis
6. Rapid Test (1.287 pcs)
7. Pelatihan bagi Tenaga Analisis
8. Pembentukan Posko Layanan
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Medis.[2]

Selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 sampai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III belum sepenuhnya efektif terlihat dengan masih tingginya kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru. Pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) I terjadi penambahan kasus yang sangat signifikan, sehingga tidak terjadi keefektifan dalam penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dengan berbagai kegiatan dan upaya penanganan yang dilakukan. Kemudian, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengambil keputusan kembali yaitu dengan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2020. Selama Pelaksanaan PSBB tahap II ini masih terjadi penambahan kasus sehingga dalam pelaksanaan PSBB ini Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru kembali melakukan

[2] Laporan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Pekanbaru

kegiatan promotif, kegiatan preventif dan kuratif yang dapat membantu menekan perkembangan penyebaran kasus Covid-19. Selanjutnya di tetapkan kembali pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III. Selama pelaksanaan PSBB ini terjadi keefektifan penanganan kasus Covid-19 di tandai dengan penurunan kasus positif yang signifikan yakni hanya 1 kasus positif. Sehingga tidak diperlukan kembali melakukan atau memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru dan diganti dengan menerapkan tatanan hidup baru (*New Normal Life*) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur sebelumnya.

selain itu Pemerintah juga menggunakan kanal komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai perkembangan kasus Covid-19, juga secara rutin memperbarui perkembangan statistic wabah Covid-19 perkecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang dapat diakses melalui: ppc-19.pekanbaru.go.id.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan tahun 2020
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan tahun 2020

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka yang menjadi manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan tentang efektivitas Pemerintah
2. Manfaat Praktis
   Sebagai masukan bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1) Kerangka Teori

Efektivitas Pemerintah

Menurut Siagian, berpendapat bahwa efektivitas terkait pengaturan yang telah di tetapkan dan terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah di tetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai

sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya.

Menurut Beni, mengemukakan bahwa efektivitas juga merupakan kolerasi derajat keberasilan suatu operasi pada area publik. Suatu aktivitas bisa di katakan efektif bila aktivitas tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang menjadi sasaran utama.[3]

Ukuran Efektivitas Pemerintah

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud supaya dalam pelaksanaan program atau tugas dapat mencapai sasaran yang terarah dan tujuan dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Yang dimana telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, yang merupakan salah satu indikator efektivitas adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia.[4]

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan

Efektivitas merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh Pemerintah yang menjadi hal penting dalam mencapai tujuan-tujuan dari program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah sebagai kunci dari kesuksesan suatu tujuan. Dalam hal ini efektivitas ini sebagai pintu masuk untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Bidang Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas atau tidak yang di kemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

1) Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Menurut S.P. Siagian kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan indikator utama dan keseluruhan pencapaian tujuan. Kemudian untuk mengukur efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai peran penting sebagai unit Kesehatan di lingkungan Kota Pekanabru dengan melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Tujuan penanganan Covid-19 bidang kesehatan Kota Pekanbaru di atur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

[3] P, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.* Jakarta: Taushia

[4] Agrio Scivo Kowaas, dkk. *Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon.* Jurnal EKSEKUTIF. Vol. 2, No.2, Tahun 2017.

Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Terdapat di point Memutuskan pada bagian Keempat Nomor 3 yang berbunyi "Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan seluruh fasilitas Kesehatan melakukan upaya-upaya pencegahan dan tindakan-tindakan medis dalam penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (*Covid-19*)* di Kota Pekanbaru". Dalam hal ini Walikota Pekanbaru telah mengeluarkan Keputusan mengenai upaya penanganan yang dilakukan bidang Kesehatan bertujuan untuk menangani penyebaran kasus Covid-19 Kota Pekanbaru. Agar dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan efektif.

Adapun rangkaian kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani Covid-19 yaitu melakukan rapat dengan Forkopimda Kota Pekanbaru untuk membahas mengenai penanganan Covid-19 juga mendirikan posko di halaman Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru untuk memantau dan menangani penyebaran Covid-19, selanjutnya di bentuk Tim Kaji Cepat tentang perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru. Kemudian dengan kondisi yang berkembang Pemerintah Kota selanjutnya mengambil langkah lain yaitu dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Pekanbaru mengikuti skema Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase* 2019 (Covid-19). Upaya penanganan kesehatan menjadi prioritas utama dalam mencegah penyebaran Covid-19, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai peran penting sebagai unit Kesehatan di lingkungan Kota Pekanbaru. Dengan melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19.

Berbagai upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang maksimal, Karena masih dilakukan dengan berbagai kebijakan lokal dan masih menggunakan Surat Edaran yang di keluarkan Pemerintah Kota dan melalui berbagai edukasi dari Dinas Kesehatan juga di karenakan dalam hal ini segala kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Menteri Kesehatan yang kemudian menjadi gambaran dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menangani penyebaran Covid-19. Untuk menindak lanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/250/2020 Tentang Penetapan Pembatasasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Pekanbaru. Kemudian langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yaitu dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu PSBB I sampai dengan PSBB III. Dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

Selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) I berlangsung masih terjadi peningkatan kasus baik ODP, PDP maupun kasus Positif, namun

demikian berdasarkan analisis perkembangan PSBB mampu menekan laju perkembangan penyebaran Covid-19 dan terjadi keefektifan dalam upaya penekanan peningkatan kasus Covid-19, selanjutnya untuk mengoptimalisasi penekanan terhadap perkembangan kasus Covid-19 Kota Pekanbaru, maka Pemerintah kembali melakukan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) II mulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2020, kemudian selama pelaksanaan PSBB tahap II ini Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru semakin gencar melakukan upaya-upaya penekanan penyebaran Covid-19, namun terjadi kembali kenaikan kasus ODP, PDP dan Positif di Kota Pekanbaru sehingga perlu dilakukan kembali pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III di Kota Pekanbaru yang di mulai dari tanggal 15 s.d 28 Mei 2020, kemudian selama pelaksanaan PSBB tahap III berlangsung terjadi keefektifan Pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 dapat diketahui dari penurunan kasus positif Covid-19 yang hanya terjadi 1 kasus Positif saja. Sehingga dengan hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru tidak akan memperpanjang pelaksanaan PSBB dan akan di tindaklanjuti dengan penerapan tatanan hidup baru (*New Normal Life*)

2) Kejelasan Strategi Tercapainya Tujuan

Adapun strategi yang dilakukan bidang kesehatan Kota Pekanbaru untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat, dilakukan bidang kesehatan Kota Pekanbaru dalam menangani kasus Covid-19 :

1. Kerjasama di Fasilitas Kesehatan

Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru saling bekerjasama untuk menangani perkembangan kasus Covid-19. Kerjasama ini terjadi antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan pasien terpapar Covid-19. sebelum terjadi Kerjasama antara Faskes di lingkungan Kota Pekanbaru terlebih dahulu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berkerjasama dengan setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya di keluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu, kemudian Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menetapkan Rumah Sakit Daerah Madani sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Kota Pekanbaru dan bekerjasama dengan Rumah Sakit lainnya di lingkungan Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai strategi untuk memberikan pelayanan dan penanganan terhadap pasien Covid-19 dan masih mempersiapkan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendukung dan memenuhi tersedianya pelayanan yang nyaman terhadap pasien terpapar Covid-19. Dengan adanya penyediaan pelayanan kesehatan berupa tersedianya RSD Madani sebagai Rumah Sakit Rujukan penangan Covid-19 Kota Pekanbaru belum sepenuhnya terjadi terpenuhi strategi yang efektif hal ini di karenakan belum tersedianya fasilitas ruangan yang mampu nemanpung dan menangani pasien Covid-19 dengan banyaknya keterbatasan baik dari ruangan, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya yang tidak sesuai

jumlah nya dengan jumlah pasien terpapar Covid-19.

2. **Penanganan Pasien Terpapar Covid-19**

Penanganan pasien Covid-19 merupakan hal penting yang memerlukan panduan tatalaksana yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Sehingga dalam proses temuan kasus pasien positif di lapangan dapat di tangani sesuai dengan peraturan kesehatan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kemudian untuk memudahkan masyarakat dan bidang kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19 di perlukan alur penanganan pasien Covid-19 dimana dalam hal ini telah disediakan dan dirancang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sesuai dengan skema dari Peraturan Menteri Kesehatan.[5]

Gambar 1.1 : Alur Penanganan Pasien Covid-19 Kota Pekanbaru

Sumber: Pekanbaru.go.id

Berdasarkan alur penangan diatas dapat di rincikan sebagai berikut :

1. Jika seseorang mengalami demam, dilakukan cek suhu, apabila pasien bersuhu diatas dari 38ºc kemudian dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas terdekat untuk dilakukan pengecekan selanjutnya.
2. Setelah di periksa apabila tidak menunjukkan gejala Covid-19 dapat di kategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kemudian pasien ODP di perbolehkan pulang kemudian di berikan edukasi terkait karantina dan harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah sampai sembuh.
3. Apabila ODP tidak kunjung sembuh dalam waktu 14 hari maka pasien di rujuk ke Rumah Sakit Rujukan Kota Pekanbaru yaitu RSD Madani. Di Rumah Sakit, pasien dilakukan rontgen dan cek laboratorium oleh tim pinere Rumah Sakit kemudian dari hasil tersebut dapat di tentukan rawat jalan atau rawat

[5] Erlina, Burhan. 2020. *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3.* Jakarta : Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Hlm. 14

inap di Rumah Sakit dan puskesmas di lingkungan Kota Pekanbaru.

3. **Melakukan Sosialisasi dan Edukasi**

Selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 dilakukan dan berdasarkan situasi penyebaran Covid-19 yang semakin berkembang menjangkau hampir diseluruh wilayah Kota Pekanbaru kemudian Bidang Kesehatan melakukan kegiatan promotif berupa :

Tabel 1.2 : Kegiatan Promotif Pencegahan Covid-19 Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penyiaran melalui Media elektronik	- Radio : 90 SPOT - Tv (Humas Pemko)
2	Penyuluhan Mobile	Melibatkan 21 Puskesmas se Kota Pekanbaru
3	Melalui Media Cetak	- Baleho : 6 titik - Spanduk : 1.452 buah - Poster : 2.500 lembar - Flayer : 5.000 lembar - Leafleat : 16.500 lembar
4	Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Siaga Covid-19 melibatkan 83 Kelurahan dan 601 RW se Kota Pekanbaru
5	Tempat Umum	- Mall : 10 Tempat - Swalayan : 15 Tempat - Pasar Tradisional : 4 Pasar

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Pekanbaru

Tabel diatas menunjukkan bahwa Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung turun ke lapangan maupun dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan juga melibatkan unsur masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

3) Sarana dan Prasarana yang Tersedia.

Salah satu indikator efektivitas adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang ada di Bidang Kesehatan pada awal ditemukan Covid-19 belum memadai. Penyediaan Rumah Sakit dan Laboratorium serta fasilitas kesehatan lainnya pun pada saat diawal masih belum memadai dan belum terdukungnya sarana dan prasarana seperti Thermo gun, APD (Alat Pelindung Diri), masker, sarung tangan dan bekal kesehatan seperti obat-obatan sehingga seiring berjalannya waktu dan dengan berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, kemudian mulai tersedianya berbagai sarana dan prasarana kesehatan guna membantu pasien yang terpapar Covid-19.

Selain itu, terdapat berbagai komponen masyarakat secara antusias ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19, baik yang di serahkan langsung

kepada masyarakat maupun yang di salurkan melalui Gugus Tugas. Sumbangan yang di sampaikan melalui gugus tugas berupa Alat Pelindung Diri (APD), Masker, Tangki Air, Basin Cuci Tangan, Baju Cover All, Hazmat, Sarung tangan plastik, Face Shield, Goggle Medis, Boots dan Thermo Gun.

Hal ini dilakukan oleh komponen masyarakat guna membantu bidang kesehatan dalam menangani Covid-19 di karenakan masih kurangnya alat kesehatan yang tersedia dengan melihat pada perkembangan kasus Covid-19 yang semakin berkembang. Dengan adanya hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi bidang kesehatan Kota Pekanbaru, mampu membantu menangani Covid-19 dengan efektif dan dapat melengkapi sarana dan prasarana kerja dalam menangani Covid-19 walaupun dalam hal ini sarana dan prasarana yang tersedia belum bisa terpenuhi semuanya.

b) Faktor Penghambat Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan berbagai pihak yang tergabung dalam penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, bahwa faktor penghambat dalam efektivitas penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru ini adalah:

1) Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia atau Tenaga Medis

Covid-19 merupakan virus baru yang menyebar di Kota Pekanbaru secara tiba-tiba sehingga dalam hal penanganannya di perlukan penanganan secara serius. ketidaksiapan tenaga medis dalam menghadapi virus Covid-19 juga disebabkan karena jam kerja tenaga medis yang bertambah dan diperlukan keahlian khusus dalam menangani sebab Covid-19 merupakan virus baru dan belum pernah ada sebelumnya di tambah dengan perkembangan penyebaran yang begitu cepat sehingga membuat tenaga medis memerlukan banyak tenaga dan mengeluarkan banyak waktu dari jam biasa operasional tenaga medis.

2) Sarana dan Prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Rujukan, Puskesmas dan Posko

Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan untuk menangani Covid-19 di Kota Pekanbaru belum memadai dan belum terpenuhi secara keseluruhan. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Fasilitas Kesehatan lainnya yang cukup banyak.

Terkait sarana dan prasarana yang tersedia di Posko penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru juga setiap posko belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Seperti tidak semua petugas posko yang menggunakan pakaian Hazmat dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu juga, layanan ambulance yang terbatas dengan jumlah kasus dan ketersediaan ambulance di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit yang memiliki ambulance namun tidak semuanya mengerahkan ke posko-posko kesehatan, hal ini karena Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas juga memerlukan ambulance untuk keperluan penyakit lainnya.

3) Minimnya Edukasi dan Sosialisasi Bidang Kesehatan

Kota Pekanbaru Yang Tepat Sasaran

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menangani Covid-19 juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat langsung mengenai bahaya Covid-19 baik itu yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan maupun melalui media elektronik.

Menurut Ibu Riska Yunita. S.Gz selaku Kasi Promkes Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, mengatakan:

> *"Kami, khususnya bidang promosi Kesehatan ini melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. yang dimana dalam hal ini kami melakukan edukasi dan sosialisasi di beberapa titik tempat umum seperti di pasar tradisional juga melakukan melalui mobil dengan pengeras suara. memberikan himbauan terkait penerapan protocol Kesehatan"* **(Hasil Wawancara, 25 Juni 2020)**

4) Manajemen Data Perkembangan Penyebaran Covid-19 Yang Kurang Akurat

Penanganan Covid-19 bukan hanya memberikan edukasi dan sosialisasi serta pelayanan kesehatan lainnya saja. Yang menjadi hal penting lainnya juga berupa perkembangan jumlah kasus penyebaran kasus Covid-19. Namun, yang menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan ketika akan melakukan turun ke lapangan atau *tracing* yaitu kadang alamat pasien yang sulit ditemukan. Tidak hanya itu, yang menjadi kendala selanjutnya dalam hal ke akuratan data pasien Covid-19 ini adalah pada saat data sampai di Pusat, terjadinya *missing* data ini yang kemudian membuat masyarakat kurang percaya terhadap adanya Covid-19.

Missing data pada "waktu" saat pelaporan menyebabkan tidak diketahuinya seberapa cepat kasus ditemukan sehingga menyebabkan hasil rekapitulasi jumlah kasus Covid-19 di Kota dan Pusat berbeda

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan, maka peneliti menarik kesimpulan dari Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan dengan berbagai rangkai kegiatan dan upaya diawal yang dilakukan seperti Temukan, Obati dan Sembuhkan (TOS). Selanjutnya dengan terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru kemudian Bidang Kesehatan melakukan kegiatan kuratif, kegiatan preventif dan kegiatan promotif yang dilakukan dinilai belum efektif terlihat dengan masih tingginya kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Pekanbaru dan masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menangani pasien Covid-19 yang meningkat dan rangkai kegiatan yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan dengan tepat sasaran.
2. Faktor penghambat yang di hadapi Bidang Kesehatan Kota

Pekanbaru dalam menangani kasus Covid-19 yaitu : Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia atau Tenaga Medis, Sarana dan Prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Rujukan, Puskesmas dan Posko Kesehatan, Minimnya Edukasi dan Sosialisasi Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru Yang Tepat Sasaran dan Manajemen Data Perkembangan Penyebaran Covid-19 Yang Kurang Akurat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai saran berupa :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bidang Kesehatan Kota Pekanbaru untuk lebih menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan promotif, preventif maupun kuratif untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dan Kota Pekanbaru dapat segera terbebas dari Covid-19. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Masyarakat sangat disarankan untuk tetap mematuhi semua peraturan dan menghargai usaha Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru dengan tetap disiplin terhadap peraturan dan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Disarankan kepada Pekerja Medis diharapkan dapat menjaga kesehatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien Covid-19 dan tetap menerapkan perilaku disiplin terhadap protokol kesehatan agar dalam menangani pasien Covid-19 tetap dalam kondisi yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam, Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.

Alwi dan Wirman Syafri. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik.* Jatinangor: IPDN PRESS.

Beni, P. 2016. *Konsep & Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.* Jakarta : Taushia.

Burhan, Erlina, dkk. 2020. *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3*. Jakarta : Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

Fauzan, Almanshur & Djunaidi Ghony. 2016. *Metode Peneltitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.* Yogyakarta: Gava Media.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung : Refika Aditama.

Mardalena, dkk. 2016. *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi.* Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Monardo, Letnan Jendral TNI Doni. 2020. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia.* Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta

Prastowo, Andi. 2014.*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Peneltian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan*

Jurnal:

Chadijah, Siti. Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Kertha Semaya,* Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

Ginanjar, Diyar. Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Darma Praja. Vol.13, No.1, Tahun 2020.

Hasrul, Muh. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) LEMBAGA PENALARAN DAN PENULISAN LEMBAGA ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN*. Vol 3 No 2. Tahun 2020

Kowaas, Agrio Scivo, dkk. Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Dikota Tomohon. *Jurnal EKSEKUTIF*. Vol. 2, No.2, Tahun 2017

Ristyawati Aprista. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Administrasi Law & Governance Journal. Vol.3, No. 2, Tahun 2020.

Sabarudin, dkk. Efektivitas Pemberian Edukasi Secara *Online* Melalui Media Video dan *Leaflet* Terhadap Tingkat Pengetahuan Pencegahan Covid-19 di Kota BauBau. Jurnal Farmasi Galenika (*Galenika Journal of Pharmacy*) Vol.2, No.6. Tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina kesehatan.

Peratuan pemerintah No 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid 19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /250/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase Covid-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Media Online :

Kemkes.go.id. Status wabah corona di Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional. https://www.kemkes.go.id/article/view/20031500003/status-wabah-corona-di-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.html. Diakses pada 06 Juli 2020. Pukul 11.20 wib

Pusat Penelitian Politik. Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah "Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19". http://politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2020/1377-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19 . Diakses pada 06 Juli 2020. Pukul 10.00 wib